

**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MUSLIM  
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA  
OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh:**

**SRI RAHMADANI SIMANULLANG**

**NIM: 13.14.1.006**

**Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2018**

**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MUSLIM  
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA  
OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh:**

**SRI RAHMADANI SIMANULLANG**

**NIM: 13.14.1.006**

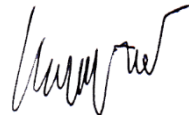
**PROGRAM STUDI: PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si  
NIP. 19621231 198903 1 047**

**Pembimbing II**



**Maulana Andi Surya, Lc, MA  
NIP. 19750325 200801 1 011**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

Nomor : Istimewa Medan, 14 Agustus 2018  
Lamp. : 7 (tujuh) Exp. Kepada Yth:  
Hal. : Skripsi Bapak Dekan Fakultas Dakwah  
An. Sri Rahmadani Simanullang dan Komunikasi UIN-SU  
Di-  
Medan

*Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Sri Rahmadani Simanullang yang berjudul: **Program Pemberdayaan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Tapanuli Tengah**. Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya pada Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Medan.

Demikianlah untuk dapat dimaklumi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

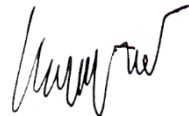
Wassalam

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si**  
**NIP. 19621231 198903 1 047**

**Pembimbing II**



**Maulana Andi Surya, Lc, MA**  
**NIP. 19750325 200801 1 011**

**Sri Rahmadani Simanullang.** Program Pemberdayaan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tapanuli Tengah. (2018)

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2018.

### **ABSTRAK**

Nama : Sri Rahmadani Simanullang  
NIM : 13.14.1.006  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si  
Pembimbing II : Maulana Andi Surya, Lc, MA  
Judul Skripsi : Program Pemberdayaan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa saja program Dinas Pemberdayaan Perempuan, realisasi program yang telah disusun serta mengungkapkan kendala dan solusi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan program yang telah disusun.

Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil temuan penelitian adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, program peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, program pengelolaan sistem gender dan anak, program pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak, dan program perlindungan khusus anak. Realisasi dari program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan adalah pembinaan dan pengembangan kabupaten layak anak (KLA), mengikuti jambore anak tingkat provinsi, terbinanya P2TP2A, sosialisasi dan pendampingan korban KDRT, pelatihan kewirausahaan, dan membuat sistem data terpilah gender. Kendala yang dihadapi, yaitu anggaran, tingkat pendidikan yang masih rendah, kurangnya partisipasi masyarakat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Solusi yang diberikan adalah meningkatkan sosialisasi, membangun dan memfasilitasi P2TP2A, serta membuat website yang mengirimkan data tentang pemberdayaan perempuan melalui SIMPONI.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahmadani Simanullang  
NIM : 13.14.1.006  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul Skripsi : Program Pemberdayaan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah

Menyatakan bahwa sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Institut batal saya terima.

Medan, Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan

A yellow rectangular stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a serial number "AC88AAFF27492113" in the middle, and "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Sri Rahmadani Simanullang

NIM: 13.14.1.006

## PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG

Skripsi yang berjudul “Program Pemberdayaan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Tapanuli Tengah” oleh Sri Rahmadani Simanullang Nim: 13141006, telah disidangkan pada tanggal 5 September 2018 dan dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan.

Medan, Desember 2018

### Penguji I



Dr. Soiman, MA

NIP. 19660507 199403 1 005

### Penguji II



Salamuddin, MA

NIP. 19740719 200701 1 014

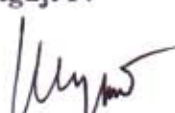
### Penguji III



Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si

NIP. 19621231 198903 1 047

### Penguji IV



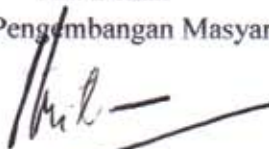
Maulana Andi Surya, Lc, MA

NIP. 19750325 200801 1 011

Mengetahui,

An. Dekan

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. H. Muaz Tanjung, MA

NIP. 19661019 200501 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731  
Telp. (061) 6615683- 662292, Fax. (061) 6615683  
www.fdk.uinsu.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **Program Pemberdayaan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah**, An. Sri Rahmadani Simanullang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah pada tanggal 5 September 2018, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasyah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan

Ketua

**Dr. H. Muaz Tanjung, MA**  
NIP. 19661019 200501 1 003

Sekretaris

**Salamuddin, MA**  
NIP. 19740719 200701 1 014

**AnggotaPenguji:**

1. Dr. Soiman, MA  
NIP. 19660507 199403 1 005
2. Salamuddin, MA  
NIP. 19740719 200701 1 014
3. Prof. Dr. Abdullah, M. Si  
NIP. 19621231 198903 1 047
4. Maulana Andi Surya, Lc, MA  
NIP. 19750325 200801 1 011

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

**Mengetahui:**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUMATERA UTARA



**Dr. Soiman, MA**  
NIP. 19660507 199403 1 005

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberdayakan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Tapanuli Tengah”. Shalawat berangkaikan salam marilah kita curahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga beserta para sahabatnya semoga kita termasuk kedalam golongan ummatnya yang mendapatkan *syafa'at* nya di *yaumul akhir* kelak, *amiin allahumma aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan saran serta bimbingan sangat diharapkan kesempurnaanya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan raga, khusus untuk orang yang paling berarti dalam hidup saya, yang telah berjuang dan berkorban demi saya yaitu kedua orang tua saya yang



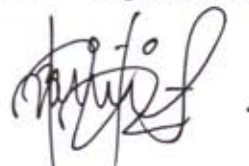
tercinta, Ayahanda Erbin Simanullang dan Ibunda Dermawati Sitompul, serta Adik-adik saya Zulhikam Arif Simanullang, Devi Nurhalida Simanullang, dan Rizky Simanullang, serta keluarga saya yang telah banyak memberi kasih sayang cinta, nasehat, dukungan, doa, semangat, pengorbanan, dan perjuangan yang tidak akan saya lupakan, serta bantuan materil sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik dan waktu tiga tahun lebih lamanya. Terima kasih Ayahanda, Ibunda hanya Allah yang dapat membalas kebaikan dan pengorbanan yang telah ayah dan ibu curahkan untuk anakmu Sri Rahmadani Simanullang.

2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Soiman, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, dan Bapak/Ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah banyak mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
5. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Terima kasih kepada Bapak Maulana Andi Surya, Lc, MA, selaku Dosen Pembimbing skripsi II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Terima kasih kepada Ibu Tioprida Sitompul, SE, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memberikan saya izin untuk melaksanakan penelitian saya.
8. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat terbaik saya, Riza Khairuna Sari, Siti Hajar, Siti Kholija, Rika Rahayu Panggabean, Fuja Sari Lumban Tobing, Rahmah Ferdiani Siregar, Desi Angraini, Siti Dewi Ramadhani, Rissa Aini Namiera Nasution, Gita Mawaddah Siregar, Irma Yani, Alfi Dzikri Nasution, dan Maulana.
9. Terima kasih kepada rekan-rekan saya di jurusan PMI stambuk 2014.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca demi kebaikan di masa yang akan datang.

Medan, Agustus 2018



**SRI RAHMADANI SIMANULLANG**  
**NIM. 13. 14. 1. 006**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Program.....	11
1. Pengertian Program.....	11
2. Jenis Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	12
B. Konsep Pemberdayaan.....	13
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	13
2. Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Islam .....	16
C. Konsep Keluarga Sehat .....	18
1. Pengertian Sehat .....	18
2. Defenisi Keluarga Sehat .....	19

3. Karakteristik Keluarga Sehat .....	19
4. Prioritas Keluarga Sehat .....	20
5. Indikator Keluarga Sehat .....	20
6. Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan .....	21
D. Konsep Sejahtera .....	23
1. Pengertian Kesejahteraan .....	23
2. Ruang Lingkup Kesejahteraan .....	24
3. Pengukuran Kesejahteraan .....	24
4. Defenisi Keluarga Sejahtera .....	25
5. Tujuan Keluarga Sejahtera .....	26
6. Kriteria Keluarga Sejahtera .....	26
E. Hukum Perempuan Bekerja Dalam Islam.....	31
F. Kajian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kabupaten Tapanuli Tengah .....	41
1. Latar Belakang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	41
2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	46
3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	47
4. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	47
B. Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah .....	48
C. Realisasi Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah .....	51
D. Kendala dan Solusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah .....	59
1. Kendala yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	59
2. Solusi yang Diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	63
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	64
2. Saran .....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
--------------------------	--

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, pemerataan gender antara perempuan dengan laki-laki sangatlah diperdebatkan. Dimana perempuan dianggap jauh masih tertinggal dibawah laki-laki. Pada hakikatnya perempuan sebenarnya memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki jika diasah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Raden Ajeng Kartini dalam bukunya yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Dalam hal ini membuat kerentanan sosial akibat perempuan tidak memiliki akses dalam setara dan berkeadilan gender. Isu-isu dalam ketimpangan gender masih melanda. Seperti halnya perempuan dicap sebagai makhluk yang lemah dan tidak mampu mandiri tanpa bantuan laki-laki, kodrat perempuan dan keterbatasan perempuan menjadi subordinat laki-laki, objek kekerasan, terpinggirkan dalam kegiatan pembangunan karena pembangunan itu sendiri belum responsif gender. Dimana kegiatan pembangunan hanya dinikmati dan dilaksanakan laki-laki, perempuan memiliki peran ganda dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dan keluarga, yang mana laki-laki biasanya dicap sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah saja. Dan yang terakhir ialah kesenjangan ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Indah Ahdiah, *Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat*, (Jurnal Academica Fisip Unpad, Vol. 05, No. 02/2013), hlm. 1089, diakses tanggal 03 Juni 2018 pukul 12.56 WIB

Dalam permasalahan gender ini, diperlukannya kesetaraan gender sesuai dengan yang telah disampaikan, untuk meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan Indonesia harus menghadapi banyak sekali tantangan. Masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai masyarakat kelas dua, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukannya pendidikan bagi perempuan, agar pengetahuan perempuan dapat membantu perempuan dalam pemerataan gender tersebut.<sup>2</sup>

Pemerintah harus mulai dengan membuat kebijakan yang mengarusutamakan gender dan pelibatan peran perempuan dalam pembangunan. Selama ini, tak dapat dipungkiri bahwa peraturan perundangan yang ada di Indonesia mengalami bias gender. Meskipun pasal 27 UUD RI tahun 1945 menjamin kesamaan hak bagi seluruh warganegara di hadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan, masih banyak dijumpai materi dan budaya hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan tidak berkeadilan gender.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa bagaimanapun zaman telah berkembang, bagaimanapun peradaban manusia telah meningkat, bagaimanapun ilmu dan pengetahuan telah mengalami kemajuan yang pesat, peran perempuan dalam masyarakat kita masih saja dianggap sebagai manusia kelas dua, manusia setelah laki-laki, sang manusia pertama yang mempunyai kekuasaan sangat besar dalam

---

<sup>2</sup>Ratih Probosiwi, *Perempuan dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jurnal Kajian Ilmu Administrasi negara, Vol. 3, No. 1/2015), hlm. 42-43, diakses tanggal 03 Juni 2018 pukul 12.57 WIB



kehidupan. Sehingga perlu diketahui mengenai peranan perempuan dalam pembangunan dan perkembangan gender dalam pembangunan.

Pada awal Islam, kaum wanita muslim tidak memainkan peran dalam urusan-urusan masyarakat, meskipun dengan adanya semua hak yang telah diberikan Islam kepada mereka yang seringkali sama dengan yang diberikan kepada kaum lelaki.<sup>3</sup> Hal tersebut terjadi dikarenakan perempuan hanya diberikan hak-hak sepenuhnya yaitu dengan memberikan warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah izin darinya. Dalam tradisi Islam, perempuan *mukallaf* dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan dan tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah atau nazar mereka.<sup>4</sup> Hal-hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah: 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka *kaffarat* (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa

<sup>3</sup>Fatima Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 5-6

<sup>4</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010), hlm.

kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka *kaffaratnya* puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah *kaffarat* sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S. Al-Ma'idah: 89)<sup>5</sup>

Di Kabupaten Tapanuli Tengah, perempuan lebih cenderung sebagai ibu rumah tangga, tetapi tidak menutupi kemungkinan sebagiannya lagi memiliki pekerjaan diluar ibu rumah tangga seperti guru, pegawai negeri sipil, bidan, perawat, pedagang, pengusaha, petani, dan lain sebagainya. Sebahagian mereka menjadi perempuan karir hanya untuk menyalurkan hobi dan kesenangan mereka saja, serta untuk menunjukkan bahwa perempuan itu hebat karena tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah dan anak saja atau dengan kata lain bahwa gender perempuan dan pria sudah setara.

Walaupun ada perempuan sebagai perempuan karir tetapi ia juga memprioritaskan keluarganya diatas pekerjaannya tersebut. Dengan kata lain, sebagian perempuan di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki peran ganda, yaitu sebagai perempuan karir dan sebagai ibu rumah tangga. Mereka harus membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga mereka agar di rumah tangga mereka tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

Begitu juga dengan perempuan yang berada di pedesaan khususnya di daerah terpencil, mereka juga memiliki peran ganda selain hanya menjadi ibu rumah

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir: Edisi yang Disempurnakan Jilid X*, (Jakarta: Lantera Abadi, 2010), hlm. 352

tangga, mereka juga harus berjuang untuk menutupi kekurangan ekonomi rumah tangga mereka dan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Sejak tahun 2005 kaum perempuan di Tapanuli Tengah sudah mulai diberdayakan. Selain dari pihak desa sendiri, mereka juga diberdayakan oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Masyarakat diberdayakan dengan program-program yang telah disusun sedemikian rupa agar masyarakat terkhusus perempuan di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak terdiskriminasi oleh kaum lelaki.

Perempuan di Kabupaten Tapanuli Tengah diberdayakan guna meningkatkan kualitas hidup mereka, meningkatkan peran mereka dalam rumah tangga, meningkatkan peran mereka dalam pembangunan, meningkatkan ekonomi mereka dan lain sebagainya. Mereka tidak mendapatkan manfaat pemberdayaan itu hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi keluarga mereka terutama dalam menuju keluarga yang sehat dan sejahtera.

Pada masa dahulu perempuan muslim harus berkhidmat kepada suaminya dan menunaikan amanah mengurus anak-anaknya berdasarkan syari'at Islam. Allah mewajibkan kepada dirinya untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya. Menurut ajaran Islam, isteri tidak dituntut keluar rumah mencari nafkah, akan tetapi ia justru diperintahkan tinggal dirumah guna menunaikan

kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzab: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. Al-Ahzab: 33)<sup>6</sup>

Pemberdayaan perempuan di Tapanuli Tengah tidak hanya untuk kaum perempuan non muslim, kaum perempuan muslim pun juga ikut di dalam program pemberdayaan. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran perempuan, khususnya perempuan muslim untuk menata kehidupannya dan juga kehidupan keluarganya menuju keluarga sehat dan sejahtera selain menjadi keluarga *sakinah mawadadah warohmah*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Program pemberdayaan perempuan muslim menuju keluarga sehat dan sejahtera oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah.”**

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir: Edisi yang Disempurnakan Jilid X*, (Jakarta: Lantera Abadi, 2010), hlm. 574

## B. Batasan Istilah

Dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang perlu dibatasi agar tidak terlalu luas penjelasannya. Beberapa istilah tersebut, yakni:

1. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.<sup>7</sup>
2. Pemberdayaan perempuan muslim adalah upaya optimalisasi potensi perempuan secara umum dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan perspektif Islam.<sup>8</sup>
3. Keluarga sehat adalah suatu kondisi atau keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, dan sosial yang kemudian memungkinkan terciptanya keluarga utuh agar bisa hidup normal secara sosial maupun ekonomi.<sup>9</sup>
4. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan..<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup><http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 19.48 WIB

<sup>8</sup>Abdul Aziz dan Muhammad, *Fatwa-Fatwa Wanita dan Keluarga*. (Jakarta: Daruh Sunah, 2005), hlm. 54

<sup>9</sup>S. Kruyt, *Keluarga Sehat*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1994), hlm. 35

<sup>10</sup>Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1992), hlm. 23

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja program pemberdayaan perempuan muslim menuju keluarga sehat dan sejahtera yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Bagaimana realisasi program pemberdayaan perempuan muslim menuju keluarga sehat dan sejahtera yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tapanuli Tengah?
3. Apa kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan muslim di Kabupaten Tapanuli Tengah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui program-program pemberdayaan perempuan muslim menuju keluarga sehat dan sejahtera oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Untuk mengetahui realisasi program pemberdayaan perempuan muslim menuju keluarga sehat dan sejahtera oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Tapanuli Tengah.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan muslim di Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai program pemberdayaan perempuan muslim menuju keluarga sehat dan sejahtera oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh di kursi perkuliahan dalam kehidupan yang sesungguhnya.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan tentang program pemberdayaan perempuan muslim menuju keluarga sehat dan sejahtera oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai program pemberdayaan perempuan muslim menuju keluarga sehat dan sejahtera oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **A. Konsep Program**

##### **1. Pengertian Program**

Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan akan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dalam hal ini ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu:<sup>11</sup>

- a) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan.
- b) Terjadi dalam waktu relatif lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut Joan sebagaimana dikutip Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Program adalah segala sesuatu yang dicobalakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil dan pengaruh. Dalam hal ini, suatu program dapat saja berbentuk nyata (tangible) atau bentuk abstrak (intangible). Menurut Fuerstein program adalah sebuah rencana yang diputuskan terlebih dahulu, biasanya dengan sasaran-sasaran, metode, urutan dan konteks tertentu. Sedangkan menurut Suherman dan Sukjaya,

---

<sup>11</sup>Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 5

program adalah suatu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu berupa aktifitas atau rangkaian aktifitas yang direncanakan.

## **2. Jenis Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Jenis program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberdayakan perempuan terbagi atas tiga program besar, yaitu:

- a) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- b) Program perlindungan anak.
- c) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari tiga program besar tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membagi lagi program tersebut kedalam subprogram yang dikelola oleh bidang masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konstruktivisme (*constructivist*) yang dikemukakan oleh Glasersfeld. Ia menyatakan konstruktivisme

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 5

sebagai “teori pengetahuan dengan akar dalam *filosofi, psikologi* dan *cybernetics*” yang membentuk konsepsi pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktif menerima apapun melalui pikiran sehat atau melalui komunikasi. Hal itu secara aktif terutama dengan membangun pengetahuan dan membiarkan sesuatu untuk mengorganisir pengalaman yang ada bukan untuk menemukan sesuatu yang tujuan langsung kenyataan konstruktivisme pada dasarnya adalah suatu pandangan yang didasarkan pada aktivitas individu dengan menciptakan pengetahuan yang luas kepada individu lainnya.

Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting.<sup>13</sup> Pada proses pemberdayaan masyarakat, pendekatan teori belajar secara konstruktivisme perlu ditanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman untuk berubah.

## **B. Konsep Pemberdayaan**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan

---

<sup>13</sup>Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.153

adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>14</sup>

Menurut Jim Ife yang dikutip oleh Zubaedi, konsep pemberdayaan memiliki dua konsep pokok, yakni konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Pengertian dijelaskan dengan empat perspektif, yaitu *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*<sup>15</sup>.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife juga mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, yakni:

- a. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan hidup lebih baik.
- b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan yang dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.

---

<sup>14</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), hlm. 24

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 25

- d. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
- e. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
- f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. *Pertama*, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapisan bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke Masa*, (Bogor: IPB Press, 2010), hlm. 27-28

## **2. Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Islam**

Pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Kerangka pikir pemberdayaan perempuan menuju kesadaran gender, peningkatan keterampilan, dalam kaitannya dengan kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan suasana lingkungan.

Pemberdayaan perempuan diindikasikan oleh situasi ketika sebagian besar mayoritas dari perempuan akan mampu menikmati “kebebasan memilih” untuk mandiri dan mengembangkan diri sehingga dapat memiliki kesetaraan akses terhadap sumberdaya di ranah domestik atau publik, memperoleh kesempatan dan kekuasaan.

Untuk relasi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, Indonesia membentuk Kementrian Khusus perempuan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Sejumlah besar organisasi kekhususan dan kelompok perempuan terlibat sangat aktif dalam mempromosikan peningkatan perempuan dalam berbagai bidang dan pada semua level pemerintahan. Instansi pemerintah yang besar juga memasukkan provinsi untuk mempromosikan peningkatan peran perempuan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Perempuan adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai andil dalam perjuangan penegakan sistem Islam. Islam tidak menyia-nyiakan upaya yang dilakukan perempuan, karena ia juga manusia sama dengan laki-laki yang oleh Allah telah diberi kewajiban yang sama untuk berjuang meninggikan agama-Nya. Pemberdayaan perempuan perspektif Islam adalah upaya pencerdasan muslimah

hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Kesanalah aktivitas perempuan diarahkan.<sup>17</sup>

Pemberdayaan perempuan ini didasarkan pada visi: "Menjadi perempuan unggul sebagai *ummun wa robbatul bait* sebagai mitra laki-laki demi melahirkan generasi cerdas taqwa pejuang syariah dan Khilafah dan kesakinahan keluarga." Sementara, misinya adalah:

- a) Mengkokohkan ketahanan keluarga muslim.
- b) Melahirkan generasi berkualitas pejuang.
- c) Membangun muslimah berkarakter kuat dalam rangka *amr ma'ruf nahi munkar*.
- d) Melahirkan perempuan sebagai mitra laki-laki dalam rumah tangga dan perjuangan di masyarakat,

Bentuk dari peran muslimah adalah pemberdayaan peran ibu sebagai pendidik dan pencetak generasi pemimpin. Kesuksesan wanita tidak hanya sebagai pengatur rumah tangga, wanita juga sukses di lingkungan masyarakat bahkan dalam berpolitik sesuai dengan tatanan Islam. Tidak hanya para ibu, remaja dan lansia pun juga turut berperan dan sukses di lingkungan masyarakat asalkan apa yang dilakukannya sesuai dengan tatanan Islam.

---

<sup>17</sup>Hasanatul Jannah, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Spiritualitas Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)*, (Journal of Social and Islamic Culture, No. 32a/2017), hlm. 5, diakses tanggal 5 Juli 2018 pukul 16.15 WIB

## C. Konsep Keluarga Sehat

### 1. Pengertian Sehat

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.<sup>18</sup>

Menurut Pepkins sebagaimana dikutip R. Bayu Kusumah N, sehat adalah suatu keadaan keseimbangan yang dinamis antara bentuk dan fungsi tubuh yang dapat mengadakan penyesuaian sehingga tubuh dapat mengatasi gangguan dari luar. Sehat menurut UU No. 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan (jasmani), jiwa (rohani), dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan menurut WHO, sehat adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental, dan sosial dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.<sup>19</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan keluarga merupakan suatu perubahan dinamika sosial yang meliputi faktor biologis, psikologis,

---

<sup>18</sup>Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2016), hlm. 24

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 26



spritual, sosiologis dan budaya anggota keluarga sebagai keseluruhan sistem keluarga.

## **2. Defenisi Keluarga Sehat**

Keluarga sehat bisa dikatakan ialah kondisi maupun keadaan yang begitu sejahtera. Baik secara fisik, sosial hingga mental yang memungkinkan menjadi sebuah keluarga yang utuh yakni terdiri dari individu yang di pimpin oleh sebuah kepala keluarga dan tinggal di sebuah lingkungan agar bisa hidup dengan normal entah secara ekonomi atau secara sosial. Di dalam keluarga nantinya terjadi hubungan yang bersifat multi-fungsional yang di dalamnya terdapat banyak sekali interaksi di dalam keluarga, interaksi maupun hubungan yang terjadi ini ialah hubungan orang tua serta anak, adik serta kakak hingga suami dan juga istri.

Masing-masing dari anggota keluarga ini mempunyai karakteristik kepribadian yang bisa menjadi sebuah faktor pembangun yang berasal dari keluarga ini. Tidak jarang terjadi berbagai macam konflik yang berada di dalam keluarga, contohnya saja seperti ketegangan yang terjadi di antara orang tua serta anak, bahkan antar saudara. Sebuah keluarga ini dikatakan sehat jika mereka mampu untuk mengatasi berbagai konflik serta menjaga hubungan yang begitu sehat antar anggota keluarganya.

## **3. Karakteristik Keluarga Sehat**

Karakteristik keluarga sehat dapat dilihat dari beberapa sudut fisik, diantaranya:

- a. Keluarga yang menggunakan serta memiliki air bersih di sekitar tempat tinggal mereka.
- b. Keluarga yang mempunyai toilet yang bersih.
- c. Seluruh anggota keluarga bukan merupakan perokok ataupun pengguna zat aditif yang lain.
- d. Semua anggota keluarga memastikan jika setiap anggota cukup dalam hal gizi.
- e. Mempunyai alokasi dana yang dipergunakan untuk pemeliharaan di bidang kesehatan.<sup>20</sup>

#### **4. Prioritas Keluarga Sehat**

Prioritas program keluarga sehat terbagi menjadi empat, yakni:

- a) Kesehatan ibu. Yang dimaksud adalah menurunkan angka kematian ibu.
- b) Kesehatan anak. Yang dimaksud adalah menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan prevalensi balita pendek (stunting).
- c) Pengendalian penyakit menular. Yang dimaksud adalah mempertahankan prevalensi HIV-AIDS <0,5, menurunkan prevalensi tuberkulosis, dan menurunkan prevalensi malaria.
- d) Pengendalian penyakit tidak menular. Yang dimaksud adalah menurunkan prevalensi hipertensi, mempertahankan prevalensi obesitas pada 15,4, menurunkan prevalensi diabetes, dan menurunkan prevalensi kanker. Keempat prioritas ini diperkuat dengan penyehatan lingkungan (sanitasi dan air minum).

#### **5. Indikator Keluarga Sehat**

Indikator keluarga sehat yakni:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Decky Ferdiansyah, *Metode Pendekatan Keluarga, Terobosan Baru Dalam Pembangunan Kesejahteraan di Indonesia*, (Jurnal Majalah Farmasetika, Vol. 01, No. 04/2018), hlm. 6, diakses tanggal 03 Oktober 2018 pukul 20.46 WIB

- a) Keluarga mengikuti program keluarga berencana.
- b) Ibu hamil memeriksakan kehamilannya sesuai standar.
- c) Bayi mendapatkan imunisasi lengkap.
- d) Pemberian ASI eksklusif bayi 0-6 bulan.
- e) Pemantauan pertumbuhan balita.
- f) Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar.
- g) Penderita hipertensi yang berobat teratur.
- h) Penderita gangguan jiwa berat yang diobati.
- i) Tidak ada anggota keluarga yang merokok.
- j) Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN.
- k) Mempunyai sarana air bersih.
- l) Menggunakan jamban keluarga.

## **6. Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan**

Kesehatan keluarga harus diusahakan bersama oleh setiap anggota keluarga. Masing-masing anggota yang menjalankan perannya akan dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi keluarganya yang kemudian juga akan berpengaruh kepada masyarakat di lingkungannya. Menurut Hendrick L. Blumm sebagaimana yang dikutip oleh Maria H. Bakri, terdapat empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu:<sup>22</sup>

- a) Perilaku

---

<sup>21</sup>Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2016), hlm. 54-57

<sup>22</sup>Maria H. Bakri, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), hlm. 57

- b) Lingkungan
- c) Keturunan
- d) Pelayanan kesehatan

Empat faktor inilah yang sangat berperan bagi kualitas kesehatan keluarga. Keempatnya sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Perilaku manusia menjadi faktor pertama dalam hal kesehatan ini. Perilaku dan gaya hidup adalah dua ujung tombak kesehatan.

Dahulu orang-orang makan hasil olahan dapur sendiri, namun sekarang banyak restoran cepat saji dan ada juga perusahaan yang menyediakan bumbu-bumbu masakan yang memanjakan ibu rumah tangga yang mana kita tahu bumbu-bumbu olahan pabrik itu juga terdapat zat kimawi yang bila dikonsumsi terus-menerus akan berakibat buruk bagi kesehatan. Kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari banyak penyakit, seperti penyakit jantung, darah tinggi, stroke, kegemukan, diabetes melitus dan lain-lain.

Begitu pula dengan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tidak hanya meningkatkan kesehatan secara fisik, lingkungan yang bersih juga mampu mendorong manusianya untuk berpikir positif. Sedangkan pada lingkungan yang kumuh dan tidak terawat, penduduknya cenderung mengidap penyakit seperti gatal-gatal, infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Tak ayal masyarakat

juga akan mengidap penyakit demam berdarah dikarenakan lingkungan yang tidak bersih.

## **D. Konsep Keluarga Sejahtera**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian, tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Bubolz dan Sontag yang dikutip Euis Sunarti, kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara

---

<sup>23</sup>Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejahtera Pengembangan, Evaluasi, dan Keberhasilannya*, (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, 2006), hlm. 2-13

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 2-13

untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

## **2. Ruang Lingkup Kesejahteraan**

Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi materi dan spritual. Kesehatan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (*family well-being*) yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upah, aset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan material (*family material well-being*) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi baik sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan keluarga yang dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan. Menurut Santamarina yang diikuti oleh Euis Sunarti terdapat enam katagori kesejahteraan (*quality of life* atau *individual well-being*), yaitu fisik, psikologis, tingkat kemandirian, sosial, lingkungan, dan spritual.<sup>25</sup>

## **3. Pengukuran Kesejahteraan**

Pengukuran kesejahteraan sering menggunakan pembagian kesejahteraan kedalam dua bagian, yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif. Kesejahteraan secara objektif dan subjektif dapat dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 2-14

kecemasan jiwa dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti tidak ada air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Demikian halnya dengan kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif diantaranya adalah angka kematian bayi (*infant mortality rate, IMR*), angka pengangguran dan tuna wisma.<sup>26</sup>

Pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis, yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan perkapita dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah atau aset.<sup>27</sup>

#### **4. Defenisi Keluarga Sejahtera**

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan maerial yang layak. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>28</sup>

Keluarga sejahtera tidak selalu diukur dengan rujukan ekonomi yang baik. Namun, lebih dari itu. Dikatakan sebagai keluarga sejahtera apabila keluarga tersebut

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 2-15

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 2-16

<sup>28</sup>Harmoko, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 43

dibentuk melalui perkawinan yang sah, tingkat spritual yang mapan, dan mampu membina hubungan seimbang, selaras, dan serasi antaranggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>29</sup>

### **5. Tujuan Keluarga Sejahtera**

Tujuan dari terbentuknya keluarga sejahtera adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang masalah yang dihadapi.
- b. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam menganalisis potensi dan peluang yang dimilikinya.
- c. Meningkatkan kemauan masyarakat dalam mencegah masalah secara mandiri.
- d. Meningkatkan gotong-royong dan kesetiakawanan sosial dalam membantu keluarga, khususnya keluarga prasejahtera untuk meningkatkan kesejahteraannya.

### **6. Kriteria Keluarga Sejahtera**

Undang-undang No. 10 Tahun 1992 telah membuat kriteria tentang Keluarga Sejahtera. Kriteria yang dimaksudkan juga memiliki kesamaan dengan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.<sup>31</sup> Kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Beberapa keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut<sup>32</sup>:

---

<sup>29</sup>Maria H. Bakri, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), hlm. 45

<sup>30</sup>Harmoko, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 43

<sup>31</sup>Maria H. Bakri, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), hlm. 47

<sup>32</sup>Harmoko, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 44



a. Keluarga Prasejahtera

Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, yaitu kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan, atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, kebutuhan psikologis keluarga meliputi kebutuhan pendidikan, keluarga berencana (KB), interaksi dalam sejahtera I, kebutuhan dasar I sampai 5 telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Melaksanakan ibadah menurut agamanya oleh masing-masing anggota keluarga.
- 2) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali atau lebih.
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk aktifitas di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian.
- 4) Lantai rumah terluas bukan lantai tanah.
- 5) Bila anak sakit dan/atau pasangan usia subur ingin KB dibawa ke sarana kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga sejahtera tahap II adalah keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal serta telah dapat memenuhi

kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis telah terpenuhi. Indikatornya adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- 2) Makan dua kali sehari atau lebih.
- 3) Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
- 4) Lantai rumah bukan dari tanah.
- 5) Kesehatan anak sakit dan pasangan usia subur ingin KB dibawa ke sarana kesehatan atau petugas kesehatan.
- 6) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing yang dianut.
- 7) Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging/ikan/telur.
- 8) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru pertahun.
- 9) Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni rumah.
- 10) Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat, sehingga menjalankan fungsinya masing-masing.
- 11) Paling kurang satu anggota keluarga 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45

12) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.

13) Anak usia sekolah 7-15 tahun bersekolah pada saat ini.

14) Bila anak hidup sebanyak 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat secara teratur (dalam waktu tertentu) dalam bentuk material, keuangan untuk sosial kemasyarakatan, dan belum berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Indikator keluarga sejahtera tahap III ditambah dengan komponen-komponen sebagai berikut<sup>34</sup>:

- 1) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- 3) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan untuk itu dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antaranggota keluarga.
- 4) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- 5) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 46

- 6) Dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV/majalah.
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangannya telah terpenuhi, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi pada masyarakat. Indikator pada keluarga sejahtera tahap III plus ditambah dengan komponen berikut ini<sup>35</sup>:

- 1) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan suka rela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk material.
- 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

f. Keluarga Miskin

Keluarga miskin terjadi karena alasan ekonomi sehingga tidak bisa memenuhi lima syarat sebagai keluarga sejahtera. Meski demikian, keluarga miskin ini setidaknya seminggu sekali masih mampu makan daging atau telur atau ikan. Begitu pula dengan pakaian, paling tidak setahun sekali keluarga ini bisa berbelanja pakaian satu setel. Mengenai kepemilikan rumah, luas tanah yang dimiliki kurang dari 8 m<sup>2</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 47

g. Keluarga Miskin Sekali

Pada umumnya keluarga miskin sekali ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Segala yang dimiliki kurang dari apa yang dimiliki oleh keluarga miskin.<sup>36</sup>

### **E. Hukum Perempuan Bekerja Dalam Islam**

Seorang perempuan dalam hakikatnya memiliki tugas tetap berada di rumah suami, mengurus keluarga, dan merawat anak-anaknya. Tetapi dalam hal lain, perempuan juga memiliki hak untuk bekerja, tetapi dengan berbagai syarat dan ketentuan yang telah digariskan agama.

Dalam *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dijelaskan bahwa tugas mendasar seorang perempuan adalah mengatur urusan rumah, merawat keluarga, mendidik anak dan berbakti kepada suami. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “Perempuan itu mengatur dan bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya.”

Perempuan tidak dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah merupakan kewajiban ayah atau suaminya. Karena itu, wilayah kerja perempuan hanya di rumah. Pekerjaannya mengurus rumah sama saja dengan pekerjaan para mujahidin yang berjuang di jalan Allah. Meski demikian, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Mereka boleh melakukan jual-beli atau usaha dengan harta benda pribadinya. Tidak seorangpun melarang mereka selama mengikuti rambu-rambu yang

---

<sup>36</sup>Maria H. Bakri, *AsuhanKeperawatanKeluarga*, (Yogyakarta: PustakaMahardika), hlm. 50

telah ditetapkan agama. Atas dasar ini, mereka diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah saat melakukan transaksi jual-beli, atau kedua telapak tangan ketika memilih, mengambil dan memberikan barang dagangan.

Kriteria pekerjaan yang diperbolehkan adalah pekerjaan yang tidak termasuk dalam perbuatan maksiat, seperti menyanyi atau memainkan alat music dan tidak mencoreng kehormatan keluarga. Pekerjaan yang lainnya adalah pekerjaan yang tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan dengan lelaki asing, dan pekerjaan yang tidak mengharuskan dirinya berdandan secara berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumah.<sup>37</sup>

Perempuan diperbolehn bekerja apabila mendapat izin dari suami untuk bekerja, saat bekerja tidak keluar dan tidak melanggar adab-adab Islami dan juga moral yang berlaku (Misalnya tetap menutup aurat, tidak bercampur dan berduaan dengan lawan jenis, dan pekerjaannya tidak mengganggu ibadahnya), pekerjaan yang dipilihnya tidak melewati kodrat penciptaan dan juga jendernya sebagai wanita (misalnya saja sebagai guru, perawat, bidan, dan dokter), dan jika wanita tersebut statusnya sebagai ibu, maka dia tidak boleh melupakan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh dan mendidik anak dan menjaga rumah suaminya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta: Zamzam, 2012), hlm. 95-100

<sup>38</sup>Awy A. Qolawun, *Islam Q & A Tentang Perempuan Dari Seks Dalam Rumah Tangga Hingga Bohong Pada Suami*, (Jakarta: Noura Books, 2015), hlm. 96-98

## F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi hasil penelitian yang relevan ini merupakan bagian yang menguraikan pendapat-pendapat atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

1. Penelitian Nadya Kharima dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan melalui *Gender Mainstreaming* (Studi kasus Workshop Pemberdayaan Mubalighat I Oleh Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan Workshop Pemberdayaan Mubalighat I berlangsung selama tiga hari di Wisma Syahida dengan 30 peserta, 5 narasumber dan 4 pelaksana. Mubalighat terbukti telah membantu adanya Workshop Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. mubalighat merasa telah mendapatkan pengetahuan, pengalaman serta silaturahmi antar-mubalighat. Hingga terlihat jelas bahwa adanya sebuah keberhasilan dalam Workshop Pemberdayaan Mubalighat I terutama dalam proses pemberdayaan perempuan.
2. Penelitian Nur Rizkah.S. dengan judul Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Studi Kasus: Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai). Hasil penelitiannya adalah kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilihat dari segi efisiensi bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya sudah efisien karena seluruh kasus kekerasan seksual sudah diselesaikan dengan memenuhi target penyelesaian

kasus dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif deskriptif karena mengandalkan analisis-analisis kualitatif yang akurat dan andal, namun pengaruh arus berpikir kuantitatif masih kuat dan mengakar pada penelitian ini. Selain itu, kualitatif deskriptif lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan deduktif-kuantitatif.<sup>39</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, Jalan Dr. Ferdinand Lumban Tobing, No. 18 Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kode Pos: 22611. Telp. (0631) 371417

#### **C. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer tersebut

---

<sup>39</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 23

didapatkan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

## **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan

informasi yang diinginkan penelitian ini sesuai dengan permasalahan penelitian.

Informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu Ibu Tioprida Sitompul, SE
2. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu Ibu Marnimawati Manullang, SST.
3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu Ibu Herlina Kusumawaty, SKM
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu Ibu Jija Hannum.
5. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu Ibu Masyuni Nasution, S.Sos.
6. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu Ibu Marina AfrianiSimatupang.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis mempergunakan beberapa alat pengumpulan data. Adapun alat pengumpulan data yang dimaksud, yaitu:

### **1. Wawancara**

Wawancara yang dimaksudkan adalah wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan-informan yang telah ditetapkan dengan pedoman wawancara yang telah disusun sistematis guna mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan oleh peneliti secara lebih jelas.

### **2. Observasi**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung terhadap objek penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah. Observasi langsung dilakukan oleh peneliti sebab peneliti terjun langsung melihat terlaksananya program-program yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **3. Dokumentasi**

Peneliti melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan dan menyimpan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti.

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan analisis mengenai data-data tersebut. Untuk proses penganalisaan data, maka penganalisaan dilakukan dengan analisa domain (*domain analysis*). Maksudnya adalah peneliti hanya menargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti tanpa harus merinci secara detail unsur-unsur yang ada di dalam keutuhan objek yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Sugiyono, kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:<sup>40</sup>

1. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya agar memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data, yaitu data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, grafik, network (jejaring kerja) dan chart yang memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 246-253

3. Menarik kesimpulan/verifikasi, yaitu perubahan yang terjadi pada kesimpulan awal dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang mendukung ke tahap selanjutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten**

##### **Tapanuli Tengah**

#### **1. Latar Belakang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unsur penunjang pemerintah yang membantu Bupati Tapanuli Tengah dalam penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi wewenang daerah dalam mewujudkan visi Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera”** yang dicanangkan oleh bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2017-2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2017 di dukung oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Lembaga Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah Tipe B, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan merupakan pemekaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terbentuk tanggal 1 Februari 2017 yang dipimpin oleh Nursyam, SKM, M. Kes dan

sekarang dipimpin oleh Tioprida Sitompul, SE. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki motto yang dikenal dengan “*three ends*” yaitu:<sup>41</sup>

- a. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak.
- b. Akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan.
- c. Akhiri perdagangan manusia.

Landasan hukum pendukung pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni:<sup>42</sup>

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421).
- 3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Tioprida Sitompul, SE pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 09.30 WIB.

<sup>42</sup>Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019, hlm. 3-7



- 4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700).
- 5) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4698).
- 6) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3277).
- 7) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165).
- 8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332).
- 9) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 615).
- 10) Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas kepala dinas, sekretaris, 3 sub bagian, dan 4 bidang. Dinas ini memiliki 25 orang ASN, dan 7

TKS. Para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi atas 6 orang laki-laki, 26 orang perempuan, 17 orang beragama Islam, dan 15 orang beragama Kristen. Mereka juga dikelompokkan atas tingkat pendidikannya, diantaranya 2 orang Magister, 14 orang Sarjana, 3 orang Diploma, dan 13 orang SMA.<sup>43</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki manfaat sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Berjalannya pembangunan di bidang pemberdayaan melalui pengarusutamaan gender.
- c. Terbentuknya data terpilah yang ada di organisasi perangkat daerah masing-masing sesuai kebutuhannya.

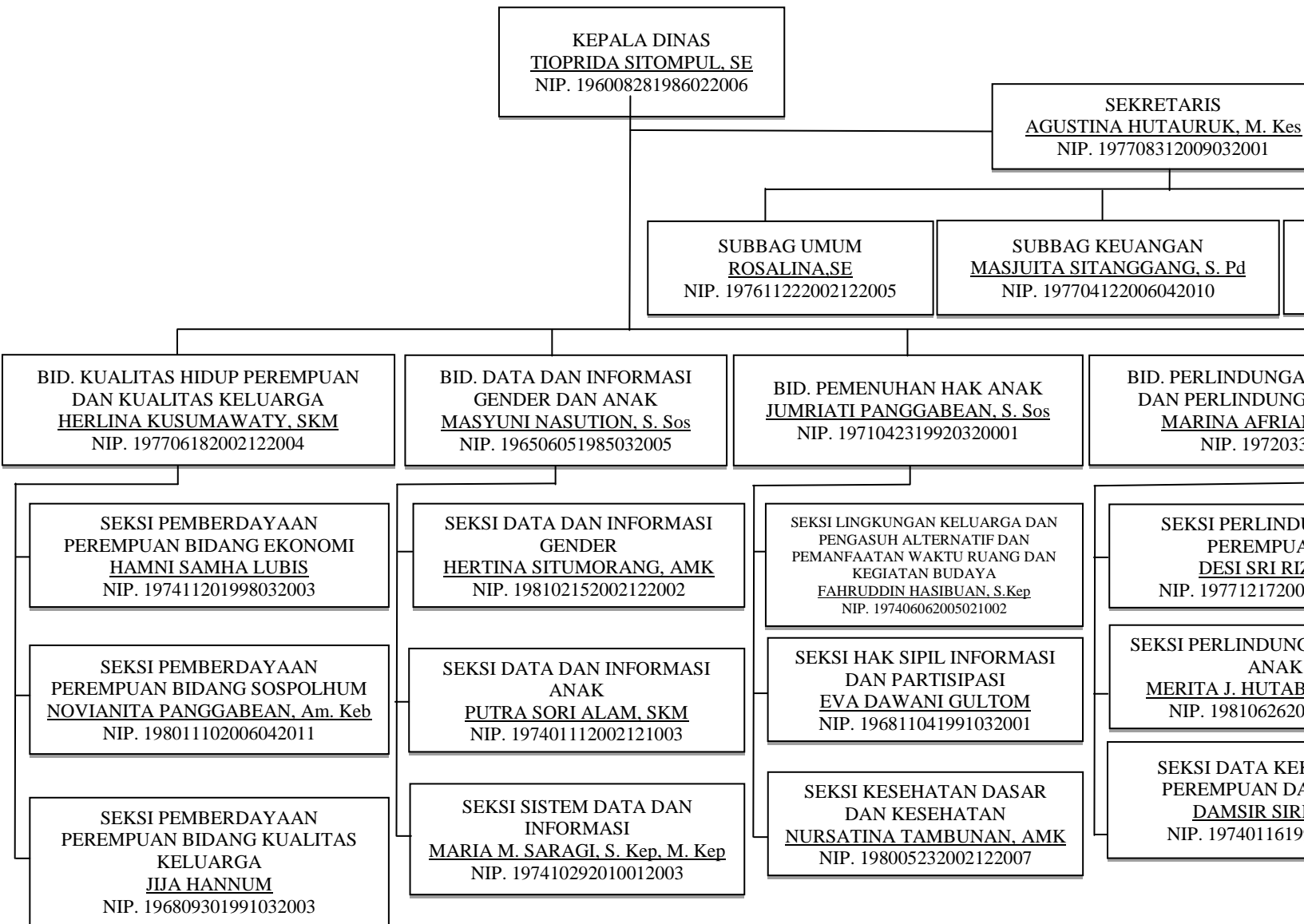
---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Tioprida Sitompul, SE pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 09.30 WIB.

<sup>44</sup>*Ibid.*, pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 09.30 WIB.

## Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Kabupaten Tapanuli Tengah



## 2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan koridor utama kegiatan perencanaan, sehingga perlu adanya kesamaan persepsi, pemahaman dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Untuk menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai lembaga yang professional, handal, aspiratif dan partisipatif, maka disusun visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “**Terwujudnya Keadilan dan Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera**”.<sup>45</sup>

Mengacu pada visi yang diutarakan diatas, maka rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ditempuh dengan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah yang disusun sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, anak, dan kesejahteraan keluarga.
- b) Membangun jaringan kerja di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, anak, dan kesejahteraan keluarga.

---

<sup>45</sup>Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019, hlm. 27

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 27-28

- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat di pembangunan pemberdayaan perempuan, anak, dan kesejahteraan keluarga.

### **3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu:<sup>47</sup>

- a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Pengoptimalisasian kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

### **4. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah adalah menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di Bidang

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Tioprida Sitompul, SE pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 09.30 WIB.

<sup>48</sup>*Ibid.*, pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 09.30 WIB

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni:<sup>49</sup>

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Menyelenggarakan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Melakukan evaluasi hasil penyelenggaraan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **B. Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki program dan kegiatan sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Tioprida Sitompul, SE pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 09.30 WIB.

<sup>50</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan anggaran, yaitu Ibu Marnimawati Manullang, STT pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 10.00 WIB

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan peningkatan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang meliputi bimbingan teknis sistem administrasi keuangan dan perencanaan bagi pengguna anggaran, PPTK, PPK dan bendahara serta bimbingan teknis sistem pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan keuangan SKPD tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis komputer.

3. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan yang dilakukan yaitu pembinaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak, fasilitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kegiatan lain yang juga dilakukan yaitu pembinaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak, mengikuti jambore anak tingkat provinsi, perlombaan kegiatan 10 program PKK kabupaten/provinsi, dan pelatihan tim pokok PKK kecamatan.

4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaraan Gender dan Anak

Kegiatan yang dilakukan adalah fasilitasi Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PTP2A), pembinaan *fokal point* Pengarusutamaan Gender (PUG), dan penyusunan profil gender.

5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan yang dilakukan adalah fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan pengelolaan analisis penyajian data informasi gender dan anak, peningkatan peran keluarga dalam pemberdayaan lansia, peningkatan peran keluarga dalam penanggulangan dan penanganan orang dengan HIV/AIDS, dan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan

Peningkatan yang dilakukan adalah peningkatan ekonomi perempuan.

7. Program Pengelolaan Sistem Gender dan Anak

Kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan sistem informasi online (SIMPONI), dan pelatihan pengelolaan data gender dan anak.

8. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan konvensi hak anak, pembuatan website informasi layak anak, dan pelaksanaan hari anak Nasional.



#### 9. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan yang dilakukan adalah fasilitasi perlindungan anak holistic dan integratif, penyusunan kebijakan tentang perlindungan khusus anak, workshop pencegahan tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, dan advokasi dan sosialisasi perlindungan anak.

### **C. Realisasi Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah**

Realisasi dari program yang sedang yang berjalan untuk memberdayakan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu:<sup>51</sup>

#### 1. Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Tujuan Kabupaten Layak Anak adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah/kota yang mana salah satu kegiatannya yaitu forum anak. Forum anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata sosial bagi anak yang berusia 18 tahun

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan anggaran, yaitu Ibu Marnimawati Manullang, STT pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 10.10 WIB

dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengarkan dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan kelompok anak yang berasal dari kesamaan minat, keterampilan atau hobi. Di kabupaten Tapanuli Tengah forum anak tersebut adalah Forum Anak Horas Tap.Teng (FARASTA).<sup>52</sup>

## 2. Mengikuti Jambore Anak Tingkat Provinsi

Organisasi yang dikelola dan dibina oleh pemerintah Tapanuli Tengah telah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan mereka menjadi pemenang serta telah beberapa kali menjadi perwakilan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk berlaga di tingkat provinsi bahkan mereka juga beberapa kali menjadi perwakilan Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional. Pada tahun 2018, Forum Anak Horas Tap.Teng menjadi juara 1 dalam Jambore Anak Tingkat Nasional.<sup>53</sup>

## 3. Fasilitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tapanuli Tengah

Tujuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tapanuli Tengah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Ibu Masyuni Nasution, S. Sos. Pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB.

<sup>53</sup>*Ibid.*, pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB

anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawas perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat serta meningkatkan kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tapanuli Tengah.<sup>54</sup>

4. Terbentuknya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PKK)

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sasaran gerakan PKK adalah keluarga yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam mental spiritual dan fisik material. Keberadaan jumlah PKK Kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa di Tapanuli Tengah saat ini adalah sebanyak 7.093 orang.<sup>55</sup>

5. Terbinanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah pusat pelayanan berbasis masyarakat yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 09.30 WIB

<sup>55</sup>Wawancara dengan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Ibu Herlina Kusumawaty, SKM pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 09.30 WIB.

dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan manusia. Tujuan P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Selama tahun 2017, penanganan kasus oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menerima pengaduan dan menangani 26 kasus. Beberapa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ditangani bersama mitra kerja unit pelayanan perempuan dan anak Polres Tapanuli Tengah. Tidak terdapat pengaduan untuk pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. Upaya pencegahan dan penanganan dilakukan sejak dini dari tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>56</sup>

#### 6. Sosialisasi pencegahan KDRT.

Kegiatan ini tidak hanya dikhususkan untuk untuk wanita yang sudah menikah tetapi juga untuk remaja dan lansia juga. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan Negara). Sosialisasi telah diadakan di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tukka, Kecamatan Badiri, dan Kecamatan Lumut. Dari 5 kecamatan yang telah diadakan sosialisasi, sosialisasi lebih lanjut diadakan di Kecamatan Pandan,

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Marina Afriani Simatupang pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 09.30 WIB.

yaitu di Desa Aek Gambir dan Desa Aek Garut dikarenakan di desa tersebut kasus KDRT dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak baik, itu dari segi fisik, psikis, dan ekonomi lebih tinggi dibandingkan desa di kecamatan yang lain. Pada tahun 2017, korban KDRT berjumlah 16 orang.<sup>57</sup>

7. Pelatihan bagi sumber daya manusia pelayanan dan pendampingan korban KDRT.

Pendampingan korban KDRT dilakukan setelah adanya pengaduan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lalu oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pencatatan serta bekerja sama dengan pihak kepolisian, setelah melakukan pencatatan, dilakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap masalah yang mengakibatkan terjadinya KDRT. Apabila masalah bisa diselesaikan dengan cara sosialisasi, maka kedua belah pihak tidak perlu dibawa ke kepolisian dan ke pengadilan/kejaksaan, online data melalui sistem informasi online (SIMFONI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan rumah aman bagi korban. Tetapi apabila tidak bisa diselesaikan dengan cara sosialisasi, maka korban KDRT di dampingi ke kepolisian dan ke jaksa sampai masalah mereka selesai dan apabila korban KDRT tersebut cacat, maka pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak langsung merujuk korban tersebut ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Ibu Jija Hannum pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 14.20 WIB.

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dikarenakan di Kabupaten Tapanuli Tengah belum ada Rumah Sakit Jiwa walaupun sudah ada psikolog.

Jenis Data Kekerasan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
KDRT	3	1	1	3	1	0
Kekerasan Fisik Pada Anak	0	0	1	0	1	1
Kekerasan Ekonomi Pada Anak	1	0	0	0	0	0
Kekerasan Seksual Pada Anak	0	3	0	3	0	0

Data Kekerasan Tahun 2018

#### 8. Peringatan Hari Besar Nasional Ibu dan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengutus anggota Forum Anak Horas Tap.Teng ke Surabaya dalam rangka memeriahkannya dengan tema **Gesit Empati Berani Unggul Sehat (GENIUS)**. Yang di bahas dalam tema tersebut adalah pola pengasuhan yang

berkualitas dari keluarga sebagai pengasuh utama dan pertama dari Anak. Pada tahun 2017, korban kekerasan fisik pada anak-anak berjumlah 32 orang, sedangkan korban kekerasan seksual/pelecehan berjumlah 8 orang.<sup>58</sup>

9. Peningkatan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, misalnya membuat aksesoris. Kegiatan ini terselenggara dengan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan Tim Penggerak PKK Kabupaten. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberdayakan perempuan/ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
10. terselesaikannya sistem informasi online. Dimana sistem informasi tersebut adalah data terpilah gender. Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur. Sistem data gender dan anak adalah kelembagaan, penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementrian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Ibu Herlina Kusumawaty, SKM pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 09.30 WIB.

evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.<sup>59</sup>

Perempuan	Laki-laki	Jumlah
176.353 orang	176.792 orang	353. 145 orang

Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Kelamin Tahun 2017

No	Jenis Jabatan PNS	JUMLAH		
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Fungsional Baru	589	237	826
2	Fungsional Tertentu	1066	2684	3770
3	Eselon I	0	0	0
4	Eselon II	27	5	32
5	Eselon III	133	33	166
6	Eselon IV	335	248	583
7	Eselon V	0	0	0
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2170</b>	<b>3207</b>	<b>5377</b>

Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Se-Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Ibu Masyuni Nasution, S. Sos. pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 09.00 WIB.



No	PARTAI	ANGGOTA DPR RI		
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	HANURA	6	2	8
2	GOLKAR	6	0	6
3	GERINDRA	5	0	5
4	PDIP	4	0	4
5	DEMOKRAT	3	0	3
6	PAN	3	0	3
7	PKDI	2	0	2
8	NASDEM	1	0	1
9	PKS	1	0	1
10	PBB	1	0	1
11	PPD	1	0	1
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>35</b>

Jumlah Anggota DPR Di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Jenis Kelamin Se-Kabupaten Tapanuli Tengah 2017<sup>60</sup>

#### **D. Kendala dan Solusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**

##### **Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Memberdayakan Perempuan**

##### **1. Kendala yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 09.00 WIB

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberdayakan perempuan muslim menuju keluarga sehat dan sejahtera di Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum, yakni:<sup>61</sup>

a. Anggaran

Alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap program yang ingin direalisasikan berbeda. Apabila anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup maka program yang ingin direalisasikan tidak dapat berjalan seperti yang diinginkan bahkan tidak dapat terlaksana sama sekali.

b. Tingkat Pendidikan

Kendala yang paling utama adalah masih rendahnya tingkat pendidikan yang dikecap oleh perempuan-perempuan yang ingin diberdayakan terutama yang berada di desa/kelurahan terpencil maupun wilayah perbatasan antara Tapanuli Tengah dengan Aceh Singkil, antara Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Selatan. Rendahnya pendidikan seseorang mempengaruhi pola pikirnya. begitu juga yang terjadi saat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang melaksanakan program untuk memberdayakan perempuan.

c. Partisipasi Masyarakat

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran, yaitu Ibu Marnimawati Manullang, STT pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.45 WIB

Rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan begitu apabila ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat, masyarakat tersebut kurang aktif bahkan ada yang tidak mau diajak untuk bersosialisasi dengan alasan mereka sedang bekerja, mengurus anak, sedang sibuk dan berbagai alasan lainnya.

Selain kendala umum yang dipaparkan diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki kendala lainnya yang bisa dikatakan tak luput dari perhatian, yaitu:<sup>62</sup>

- 1) Masih kurangnya perencanaan penganggaran untuk pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- 2) Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
- 3) Masih kurangnya peran perempuan dalam jabatan strategis baik di pemerintahan maupun swasta.
- 4) Rendahnya peran perempuan usia produktif dalam membantu perekonomian keluarga.
- 5) Masih rendahnya lansia yang belum mendapatkan pelatihan keterampilan.
- 6) Masih kurangnya pelatihan yang di dapat penyandang disabilitas.
- 7) Masih kurang optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- 8) Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan.

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.45 WIB

- 9) Masih kurangnya fasilitas yang layak bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan pada situasi bencana.
- 10) Masih kurangnya lembaga perlindungan perempuan yang aktif.
- 11) Masih minimnya informasi tentang data gender dan anak pada pemerintahan daerah.
- 12) Masih kurangnya fasilitas pembentukan kota layak anak.
- 13) Masih kurangnya jumlah forum anak yang dibentuk di kecamatan.
- 14) Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi di bidang perlindungan anak.
- 15) Masih kurangnya fasilitas dan lembaga yang aktif dan berperan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi anak.
- 16) Masih tingginya kasus anak korban kekerasan.
- 17) Masih kurangnya anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar.
- 18) Masih minimnya jumlah kelompok program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang ada wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 19) Masih kurangnya pemahaman dan motivasi tentang pengarusutamaan gender (PUG).
- 20) Masih kurangnya fasilitas pendukung dalam setiap pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan masih belum terlaksana maksimal.

21) Masih kurangnya data pendukung untuk memperlancar kegiatan sosialisasi KDRT.

## **2. Solusi yang Diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Solusi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencegah timbulnya kendala lebih banyak lagi, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Peningkatan sosialisasi dan motivasi pengarusutamaan gender (PUG).
- b. Membangun gedung dan melengkapi fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- c. Pembuatan website untuk mengirimkan data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tapanuli Tengah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara melalui Sistem Informasi Online (SIMPONI).
- d. Koordinasi lintas SKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- e. Menginterpretasikan program dan kebijakan gender dalam seluruh bidang pembangunan melalui fasilitasi dan penerapan model pembangunan yang responsif gender.
- f. Mengaktifkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.45 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa program diantaranya program pelayanan administrasi, program peningkatan sarana dan prasarana, program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, program peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, program pengelolaan sistem gender dan anak, program pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak, dan program perlindungan khusus anak.

Realisasi dari program pemberdayaan perempuan adalah pembinaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak, mengikuti Jambore Anak Tingkat Provinsi, fasilitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tapanuli Tengah, terbentuknya peningkatan keberdayaan masyarakat, terbinanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sosialisasi pencegahan KDRT, pendampingan dan pelatihan korban KDRT, peringatan hari besar nasional ibu dan anak, peningkatan ekonomi perempuan dan terselesaikannya sistem informasi online.

Kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberdayakan perempuan adalah anggaran yang kurang memadai,

tingkat pendidikan yang rendah, masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, masih kurangnya peran perempuan dalam jabatan strategis baik di pemerintahan maupun swasta, rendahnya peran perempuan produktif dalam membantu perekonomian keluarga, masih rendahnya lansia yang belum mendapat pelatihan, dan masih banyak yang lainnya. Solusi yang diberikan adalah peningkatan sosialisai dan motivasi pengarusutamaan gender, pembangunan gedung P2TP2A, membangun sarana dan prasarana yang mendukung dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan para pegawainya anak agar membuat strategi yang lebih sistematis agar program yang dibuat bisa terealisasi dengan baik.
2. Disarankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih mengajak masyarakat dalam sosialisasi dan pembinaan program pemberdayaan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qolawun, Awy. 2015. *Islam Q & A Tentang Perempuan Dari Seks Dalam Rumah Tangga Hingga Bohong Pada Suami*. Jakarta: Noura Books
- Ananda, Rusydi dan Tien Rafida. 2017. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing
- Aziz Abdul dan Muhammad. 2005. *Fatwa-Fatwa Wanita dan Keluarga*. Jakarta: Daruh Sunah
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group
- H. Bakri, Maria. *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika
- Harmoko. 2012. *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Manshur, Abdul Qadir. 2012. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Zamzam
- Mernissi, Fatima. 1994. *Wanita Di Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka
- S. Hubeis, Aida Vitayala. 2010. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press
- S. Kruyt. 1994. *Keluarga Sehat*. Jakarta: Gunung Mulia
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sunarti, Euis. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejahtera Pengembangan, Evaluasi, dan Keberhasilannya*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia



- Supardan, Dadang. 2009. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, Cet. II
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada media Group
- Ahdiah, Indah. *Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat*. Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 05, No. 02/2013
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsir: Edisi yang Disempurnakan Jilid X*, Jakarta: Lantera Abadi
- Ferdiansyah, Decky. *Metode Pendekatan Keluarga Terobosan Baru Dalam Pembangunan Kesejahteraan di Indonesia*. Jurnal Majalah Farmasetika, Vol. 1, No. 4/2018
- Jannah, Hasanatul. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Spritualitas Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)*. Journal of Social and Islamic Culture, No. 32a/2017
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI
- Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Probosiwi, Ratih. *Perempuan dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan*

*Sosial*. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi negara, Vol. 3, No. 1/2015

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

<http://kbbi.web.id>

<http://id.m.wikipedia.org>

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **I. Pertanyaan Umum**

- a. Bagaimana sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah?
- b. Apa visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah?
- c. Apa tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah?
- d. Apa saja tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah?
- e. Apa manfaat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah?

### **II. Pertanyaan Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian I**

- 1) Apa-apa saja program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim?
- 2) Sarana dan prasarana apa saja yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim?

- 3) Bagaimana perkembangan yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim setelah Dinas tersebut memberdayakan perempuan muslim?
- 4) Bagaimana tingkat kualitas hidup perempuan muslim sebelum dan sesudah diberdayakan?
- 5) Bagaimana kegiatan yang dilakukan dari program yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah?

**b. Tujuan Penelitian II**

- 1) Bagaimana sistem pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim?
- 2) Bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim?
- 3) Bagaimana perkembangan program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim?

- 4) Bagaimana tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim?
- 5) Bagaimana masyarakat andil dalam pelaksanaan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim?

**c. Tujuan Penelitian III**

- 1) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim?
- 2) Bagaimana solusi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim?
- 3) Program apa yang paling sulit dilaksanakan dalam memberdayakan perempuan muslim yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah?
- 4) Bagaimana tahapan penanganan terhadap korban dari tindak kekerasan yang terjadi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberdayakan perempuan muslim?

5) Apakah pemberdayaan perempuan muslim yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah sudah sepenuhnya merata keseluruh desa?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas

Nama : Sri Rahmadani Simanullang  
NIM : 13. 14. 1. 006  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Pengembangan Masyarakat  
Islam  
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 5 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Orang Tua  
Ayah : Erbin Simanullang  
Ibu : Dermawati Sitompul  
Alamat : Jl. Padang Sidempuan, Kel. Mangga Dua,  
Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah

### B. Latar Belakang Pendidikan

SD Negeri 158309 Pandan 3, Tamat Tahun 2008  
SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Tamat Tahun 2011  
SMA Negeri 1 Tukka, Tamat Tahun 2014  
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2014 – sekarang

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sebagai Anggota Muda HMI
2. Sebagai Anggota Paduan Suara Fakultas Dakwah dan Komunikasi

## **SURAT PENJILIDAN DAN PENANDATANGANAN SKRIPSI**

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi saudara

Nama : SRI RAHMADANI SIMANULLANG  
NIM : 13.14.1.006  
Jurusan : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
Judul : PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MUSLIM  
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA OLEH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH


Anggota Penguji:

1. Dr. Soiman, MA  
NIP. 19660507 199403 1 005
2. Salamuddin, MA  
NIP. 19740719 200701 1 014
3. Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si  
NIP. 19621231 198903 1 047
4. Maulana Andi Surya, Lc, MA  
NIP. 19750325 200801 1 011



Dengan ini dinyatakan dapat dijilid dan ditandatangani Dosen Penguji.

Medan, 3 Desember 2018  
Sekretaris Jurusan PMI



Salamuddin, MA  
NIP. 19740719 200701 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jl. Dr. F.L.Tobing No. 18 PANDAN 22611  
e-mail : [dpppatapteng@gmail.com](mailto:dpppatapteng@gmail.com) Telp. (0631) 371417

Pandan, 03 Agustus 2018

Kepada

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Di -

Medan

Nomor : 005 / 608 / DPPPA/ 2018  
Sifat : Biasa  
Tempiran : -  
Jenis : Izin Riset

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara No. B- 1014/ D. 1/ TL. 00/ 07/ 2018 tanggal 19 Juli 2018 Perihal Izin Riset mahasiswa :

Nama : Sri Rahmadani Simanullang  
NIM : 13141006  
Semester : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Tempat Tgl Lahir : Sibolga, 05 Februari 1996  
Alamat : Jln. Williem Iskandar Gg. Tangkul I Pancing

Benar – benar telah melaksanakan Riset/ Skripsi yang berjudul “ **Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memerdayakan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Di Tapanuli Tengah**” dan sudah mendapatkan data-data yang dibutuhkannya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan seperlunya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TIOPRIDA SITOMPUL, SE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196008281986022006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

Nomor: B-1014/D.1/TL.00/07/2018

Medan, 19 Juli 2018

Lamp : -

Prihal : **Mohon Izin Riset**

Yang Terhormat :  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Dan perlindungan Anak  
Kabupaten Tapanuli Tengah

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yaitu :

Nama	: <b>Sri Rahmadani Simanullang</b>
NIM	: 13141006
Sesmster	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Tempat Tgl Lahir	: Sibolga, 5 Februari 1996.
Alamat	: Jln. Williem Iskandar Gg. Tangkul I Pancing

sedang melaksanakan Penulisan Skripsi berjudul : **“Program Dinas  
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam  
Memberdayakan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat Dan  
Sejahtera Di Tapanuli Tengah”**. Untuk kelancaran penulisan dimaksud,  
mohon bantuan Bapak memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan  
dalam penelitian tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan  
terimakasih.

Wassalam

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan



Dr. Efi Brata Madya, M.Si  
NIP. 19670610 199303 1 003

Tembusan:

-Ketua Prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara

## DOKUMENTASI



Keterangan: Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah



Keterangan: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah





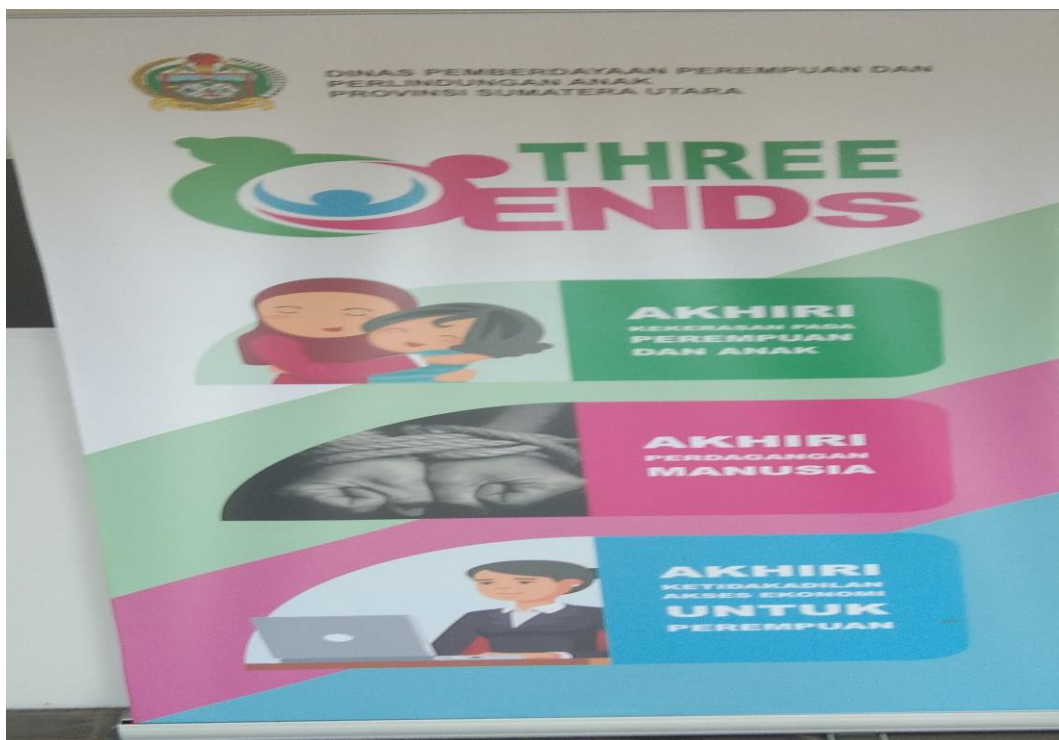
Keterangan: Foto bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah



Keterangan: Foto bersama Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah



Keterangan: Foto bersama Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga dan Salah Satu Staff Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga



Keterangan: Foto motto Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah



Keterangan: Peringatan Berhenti Melakukan Kekerasan dan Sayangi Keluarga



Keterangan: Peringatan Penyakit Menular